TAJUK RENCANA

Soeharto Jadi Pahlawan Menzalimi Reformasi

Usulan Presiden ke-2 RI Soeharto memperoleh gelar Pahlawan Nasional memunculkan polemik di tengah publik. Dan itu wajar saja karena dari singgasananya pada 21 Mei 1998.

Pengorbanan adik-adik mahasiswa (kampus) dan elemen masyarakat, korban reformasi, pegiat hukum dan demokrasi demikian besar dalam tragedi Mei 1998. Ribuan orang meninggal di berbagai daerah karena dihadapkan dengan tindakan represif militer.

Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah kelam yang mengiringi akhir era Orde Baru.

Data digital menyebut pada 4 hingga 8 Mei 1998, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga minyak 70 persen dan 300 persen untuk biaya listrik.

Intisari:

"Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto lebih banyak mudharat ketimbang manfaat. Jadi, wajib tolak!"

Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai akhir dari era Orde Baru yang berujung tragedi berdarah dan pelanggaran HAM berat.

Peristiwa tersebut menyisakan beban sejarah. Meski sudah lewat dua dekade, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk orang hilang, penampokan, penjarahan, pembakaran rumah dan pusat perbelanjaan (toko), pemerkosaan, dan tragedi pembunuhan masih belum menemukan titik terang. Dua peristiwa skala nasional seperti Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998, juga tak lepas dari keterlibatan militer yang melibatkan nama Soeharto yang kini diusahakan dan sudah disetujui sejumlah parpol dengan inisiasi Golkar untuk disahkan sebagai Pahlawan Nasional.

Sejarah mencatat bahwa era Orde Baru tergolong anti-kritik. Penguasa seenaknya saja menangkap dan menjebloskan para tokoh bersuara vokal ke penjara. Sehingga Soeharto dicap sebagai bapak otoritarianisme. Ia mengebiri sistem demokrasi dan hukum serta membredel pers yang mendukungnya. Sehingga wajar banyak pihak tidak ingin berdamai dengan sejarah kelam di masa Orde Baru dan masih posisi sangat diktator Soeharto begitu dominan dalam segala bidang dan menentukan arah kebijakan di eksekutif, legislatif dan judikatif.

Justru itu sangat beralasan jika pengusulan nama Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional pendapatkan penolakan dari banyak pihak. Sebab, "dosa-dosa" politiknya sangat banyak kepada rakyat, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan demokrasi.

Tegasnya, jika Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional sama saja menghina pejuang dan menzalimi perjuangan reformasi adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat. Gelar sakti pahlawan tersebut kepada Soeharto merupakan bentuk pelecehan dan bertentangan dengan sejarah bangsa. Pengabaian terhadap sejarah kelam, terutama berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Orde Baru sangat disesalkan sehingga tim penilai calon-calon pahlawan nasional harus nyatakan tegas mencoret nama Soeharto. Itu jauh lebih baik, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hemat kita, selain Soeharto banyak melakukan "dosa politik" dalam masa kepemimpinannya selama 3 dekade banyak juga prestasi yang diciptakannya untuk membangun bangsa lewat APBN dan Repelita. Harga-harga umumnya terkontrol dan murah sepanjang tahun. Swasembada pangan pernah terwujud dll. Tapi, kalau melihat dampak mudharatnya lebih besar ketimbang manfaat, maka wajib tolak!+

Surat Pembaca

Gencatan Senjata: Jeda Tipuan Menunda Kebebasan Palestina

Sejak 7 Oktober 2023, konflik antara Israel dan Palestina telah memasuki babak yang lebih intens dan menghancurkan, dengan korban sipil Palestina yang terus membengkak. Menurut data dari OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, pada Agustus 2025 tercatat 61.722 orang Palestina tewas dan 154.525 luka-luka sebagai bagian dari total korban sejak konflik dimulai. Data terbaru menunjukkan bahwa pada rentang 17–24 September 2025 saja, 357 warga Palestina tewas dan 1.463 lainnya terluka — menjadikan total korban terus mencapai lebih dari 65.000 jiwa. Di sisi lain, serangan yang terus-menerus dan blokade terhadap bantuan kemanusiaan memperparah bencana kelaparan, malnutrisi, dan krisis kesehatan di Gaza — hingga ratusan kematian akibat kekurangan gizi telah tercatat, termasuk puluhan anak. Fasilitas kesehatan yang lumpuh, dengan banyak rumah sakit rusak, pasokan listrik dan obat-obatan terbatas, serta ribuan pasien kehilangan akses perawatan medis yang layak.

Dalam konteks ini muncul wacana gencatan senjata: seruan agar pertempuran dihentikan sementara demi mengherentikan korban selanjutnya. Namun, dari sudut pandang kritis, gencatan senjata bukanlah solusi permanen, melainkan jeda yang bisa dimanipulasi dan dieksploitasi oleh pihak penjajah. Gencatan sering kali mengatasi gejala — yakni peluru dan bom — tetapi tidak menyentuh akar konflik: struktur okupasi, kontrol wilayah, hak kembali pengungsi, normalisasi pemukiman ilegal, dan ketiadaan akuntabilitas atas kejahatan perang. Tanpa perubahan struktural yang nyata, jeda senjata akan menjadi momen "istirahat" sementara yang memungkinkan pihak penjajah menata ulang strategi dan kembali melanjutkan dominasi dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

Lebih jauh, imbauan diplomatis seperti "gencatan senjata" atau "perdamaian sementara" dapat menjadi lip service — sekadar suara diplomasi yang menenangkan arus opini publik dan media internasional, sementara kebijakan nyata masih berlanjut. Contohnya: meski pun ada perjanjian pertukaran tahanan dalam gencatan terbaru, banyak masalah mendasar seperti pemblokiran akses bahan pokok, kontrol perbatasan yang ketat, izin pembangunan rekonstruksi yang dikendalikan oleh pihak luar, dan izin lalu lintas yang tetap yang terbatas tetap dipertahankan. Akhirnya, duna menjadi terbiasa melihat penderitaan Gaza tiap kali konflik mereda, padahal tuntutan keadilan dan perubahan struktural terus terabaikan.

Sejarah panjang juga menunjukkan bahwa para pemimpin negara — baik dari dunia Barat, Arab, maupun dunia Muslim — sering menyampaikan kecaman, ajakan damai, atau dukungan simbolik terhadap Palestina. Namun ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan aliansi strategis, semangat advokasi bagi Palestina sering melemah atau menjadi retorika kosong. Tulisan sedikit peluang diplomatis besar yang gagal diusjudkan secara efektif karena tekanan global, konflik kepentingan nasional, dan keberpihakan politik yang kompleks.

Sebagai alternatif ideal, perspektif Islam kaffah menyodorkan landasan-normatif yang integratif, keadilan hakiki (al adl), pembelaan terhadap kaum tertindas (an hasr li l mazlum), kemandirian umat (istiklal) dan pemerintahan yang adil (daulah Islamiyah). Dalam kerangka ini, dukungan terhadap Palestina tidak hanya berupa retorika, melainkan perjuangan kejuasiran politik, advokasi hukum internasional, pemberdayaan ekonomi umat dan komunitas sipil, serta strategi diplomasi yang berbasis pada data, legitimasi moral, dan koordinasi global yang independen. Rekonstruksi Gaza harus dijalankan oleh rakyat Palestina sendiri — bukan rezim eksternal atau lembaga donor yang menuntut kesergantungan. Pemerintahan Islamiyah (sebagai gagasan ideal) harus menegakkan hak-hak dasar, pertindungan pengungsi, dan keadilan sosial sebagai pondasi utama, bukan sekadar klaim kekuasaan.

Teladan dari sirah Islam menjadi pijakan moral dan praktis dalam memandang Baitul Maqdis. Ketika Umar bin al-Khattab memasuki Jerusalem sekitar tahun 637 M, ia menyusun apa yang dikenal sebagai "Umar's Assurance" (jaminan keamanan Umar) kepada penduduk kota (termasuk Kristen dan umat non-Muslim) — menjamin kebebasan beragama, perlindungan atas gereja, harta benda, kesejahteraan mereka, serta jaminan pemuksaan konvensi. Ini juga menolak untuk berdoa di dalam Gereja Makam Suci agar tidak dijadikan preseden mengubah statusnya menjadi masjid, agar kota tetap mempertahankan karakter pluralistiknya. Tindakan ini menegaskan kesembangsan antara penghormatan terhadap penduduk lokal — sebuah pelajaran bahwa menegakkan keadilan tidaklah identik dengan menindas. Sirah Umar menegaskan bahwa ketika umat Islam memegang kekuasaan, ia harus bertindak sebagai pelayan keadilan, bukan tirani.

Adapun dalam praktik, beberapa langkah yang bisa diupayakan adalah: 1. Intensifkan dokumentasi pelanggaran HAM dan kejahatan perang untuk diproses melalui mekanisme internasional; 2. Tingkatkan kapasitas advokasi dan diplomasi umat Islam secara mandiri; 3. Bangun jaringan solidaritas global (LSM, media alternatif, kaum intelektual) untuk mengajaga agar Palestina selalu dalam perhatian masa dunia; 4. Pastikan bahwa rekonstruksi Gaza dikelola oleh komunitas Palestina sendiri; 5. Penyiapan sistem ekonomi dan lembaga sosial yang kokoh agar umat di Palestina tidak mudah dijadikan alat tawar.

Gencatan senjata sesungguhnya hanya berfungsi sebagai "lampu merah" sementara di persimpangan jalan konflik — bukan lampu finish. Tanpa pijakan keadilan struktural dan agenda perubahan yang nyata, ia cenderung menjadi jeda sementara yang diperalat oleh pihak kuat. Oleh karena itu, kita mesti memiliki sikap kritis terhadap setiap penyuatan damai yang nampak manis tetapi tak menyentuh akar. Dunia harus terus terjaga agar tidak tertipu oleh lip service — hilangkanya keadilan dan pembebasan Palestina hanya akan terundud ketika umat Islam menyusun strategi yang berlandaskan ajaran, moral, dan kapasitas sendiri, dengan teladan dari para pemimpin Islam terdahulu seperti Umar dalam memandang Baitul Maqdis.

Tri Puji Astuti.

Pesan New York: Anamingkum Waalaikum

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Pernyataan Mamdani, "jangan sekali-sekali pernah nafikan andi imigran di Amerika," menegaskan tema sentral identitas kota New York

Kata-kata itu tercuap tegas dalam pidato kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York City, 2025 menandai sebuah repos politik. Lebih dari sekadar pergantian kekuasaan, ia merefleksikan transfor-masi hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mengubah suara tempat jagaan untuk mengadili alih pangguna kekuasaan. Imbauan "anamingkum" tentang sesuatu politisi, melainkan narasi untuk tentang sebuah kota yang memilih mendefinisikan ulang batas-batas kemungkinan politik.

Pidato kemenangan Mamdani, bergema jauh melampaui batas-batas geografis kota, menandai pergantian kunci pekerja hanan. Dengan dengan hingga alasan, yang selama ini kerap disembunyikan di balik mamitasan. Pengasasan kuat bahwa energi sejati berada di tangan kolektif mereka, sebuah pandangan langsung terhadap pandangan konversional tentangotoritas. Kekuatan politik sesungguhnya, ia mengingatkan, tidak terletak di atas, tetapi di bawah, bersama-sama dalam rumput, bukan di menara gading elite yang mengakar.

Pergeseran Epistemik Politik

Selama periode pra-pemilihan, proses politik sering kali didominasi oleh pendebatan elitis dan struktur kekuasaan yang telah mapan. Kampanye Mamdani, yang telah mengakumulasi dinamisikas politik, sebaliknya melakukan dekonstruksi politik, membubawanya kembali ke jalanan dan lingkungan penduduk. Aktivisme basis ini memungkinkan kemunculan kolektif aksi politik inklusif dan responsif dikota yang, meskipun multikultur, tetap rentan terhadap polarisasi politik. Ini bukan sekadar gerakan politik, melainkan sebuah eksperimen sosial yang, meskipun populasi berjuang melawan biaya hidup melonjak, akses terbatas pada layanan dasar, dan diskriminasi sistemik. Kondisi ini menciptakan lahan subur bagi narasi perubahan radikal Mamdani.

Dengan demikian sebagai Muslim dan Sosial Demokrat adalah deklarasi politik yang berani di tengah lanskap sosial yang sering kali anti-imigran dan Islamofobia. Upaya menormalisasi kegamakan identitas dalam ruang public. Dengan tanpa stereotip negatif yang dilekatkan pada kelompok minoritas. Mamdani tidak sekadar mereprepresentasikan diri, ia mewakili jutaan penduduk dengan latar belakang serupa, mengimankan pesan, keragaman adalah kekuatan tak terpisahkan. Mamdani menolak meminta maaf atas identitasnya itu, menegaskan bahwa itu sah dan tidak memerlukan validasi eksternal. Ini sikap otentisi dan martabat diri yang sangat selaras dengan gerakan identitas lain memperoleh pengakuan penuh. Pendekatan ini sangat relevan dengan konsep interseksonalitas, menyorot bagaimana berbagai identitas berinteraksi menciptakan pengalaman unik diskriminasi atau keistimewaan.

Keadilan Ekonomi, Pilar Utama

Pendekatan politik Mamdani secara fundamental menggunakan bahasa keadilan ekonomi. Agenda ini menargetkan akar masalah struktural penyebab ketidakset-araan: pembebasan sewa, pemulihan upah yang penyewa dari eksploitasi, bus cepat dan gratis untuk mengatasi mobilitas kelas pekerja, serta penilaian ulang atas unsur-unsur kehidupan dasar seperti kesehatan dan pangan yang harus berfokus pada pertumbuhan ekonomi agregat untuk kesejahteraan individu dan keluarga. Pidato ini menawarkan visi persatuan dan solidaritas di tengah maraknya narasi perpecahan. Mamdani juga bagaimana warga dan bermen-ampas bukan bekasing dapat berkatsu pada Ferlongsing Mamdani tidak unik di ganggo global. Kebangkitan Sadiq Khan, dan, dan hasil serupa di Rotterdam, Barat menunjukkan bahwa politisi Muslim jun di mampu mengatasi polarisasi budaya dan kultural yang kompleks di kota multietnis, memilih dapat positif bahwa demokrasi multikultural dan identitas adalah bukan apa adanya.

Namun, jalan perubahan tidak pelayap. Kampanye Mamdani pasti akan menghadapi serangan dan demi serangan dan kekuatan status quo, mentang-kan bahwa oligarki ekonomi dan politik akan mempertahankan dominasi. Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal, bukan akhir, kata-kata kebijakan yang mendidik publik. Pesan Mamdani relevan dalam menghadapi politik populisme global, yang sering kali memecah belah dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah struktural. Kemenangan ini tentang membuktikan bahwa yang memilih merangkul masa depan-jika tanpa kebenaran, percaya pada wujudkan harapan akan keadilan serta suatu yang dihormati.

Konfrontasi Retoris & Oligarkj Struktural

Pernyataan Zohran Mamdani, "jangan sekali-sekali pernah nafikan andi imigran di Amerika," menegaskan tema sentral identitas kota New York. Ini penegasan historis, ekonomis, dan sosiologis menantang retorika anti-imigran (Massey, 2016) Amerika Serikat, sekaligus dengan bangun oleh bangsa imigran. Gelombang imigrasi menjadikan Amerika, bagaya dari ekonomnya. Imigran adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, mengisi kesenjangan tenaga kerja, mendirikan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan menyumbang pada inovasi (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Mereka memperkaya budaya Amerika dengan tradisi, bahasa, seni, masakan, dan perspektif baru.

Meskipun kontribusi imigran besar, mereka sering menjadi kambing hitam politik, dituduh "merebut pekerjaan" atau "membebani" sistem kesejahteraan (Chavez, 2001). Retorika ini diperparah xenofobia dan rasisme. Donald Trump, misalnya, memimpin kampanye dengan narasi anti-imigran yang kuat. Sebagai imigran yang sukses di posisi politik tinggi, Mamdani adalah perwujudan poteri situasi imigran. Pidatonya menegaskan New York "kota imigran, didirikan imigran, dan dipimpin imigran." Sebuah deklarasi kuat yang memberikan legitimasi dan pemberdayaan. Ia mendelak narasi bahwa imigran adalah beban, memposisikannya sebagai kekuatan pendorong dan kontributor esensial. Agendanya tentang keadilan ekonomi, akses layanan dasar, dan perlindungan pekerja secara inclusiven menguntungkan banyak komunitas imigran, termasuk Mamdani untuk tidak menafikan andi imigran adalah pengingat fundamental tentang identitas Amerika, pangelian untuk mengakui dan merayakan kontribusi imigran dimasa lalu, kini, dan masa depan, serta menolak retorika dan kebijakan yang memecah belah.

Analisis Dinamika Pemilihan

Pemilihan Walikota New York City 2025 adalah sebuah kontestasi intensi, seminar pengesahan serap lanskap demografi, ekonomi, dan ideologis kota. Kemenangan Zohran Mamdani hasil dari rivalitas yang kompleks, perdebatan sengit, dan fluktuasi opini publik. New York City fluktuasi opini publik. New York City adalah benteng Partai Demokrat, namun dominasi itu sarat persaingan internal antara faksi moderat dan progresif. Isu kunci selalu krisis perumahan, keamanan publik, pendidikan, transportasi, dan ketimpangan ekonomi yang merajalela.

Zohran Mamdani, dengan platform progresif/sosial demokratis yang mutual progresif/sosial demokratis yang mutual sebagai kuda hitam yang mienantang kemapanan. Platform nya jelas, keadilan perumahan/pembekasan sewa, pendidikan sosial, transportasi publik gratis, penjinpan anak universal, keamanan publik berbasis komunitas, serta anti-oligarkidan anti-korupsi. Basis dukungnya multi-ras dan kalangan pemilih muda, imigran, minoritas, dan aktivis progresif yang mendambakan perubahan struktural. Kandidat moderat Demokrat, sebaliknya, menekankan stabilitas, pengalaman nasional, pertengkaran hukum konvensional, pembangunan ekonomi pro-investasi, dan solusi perumahan berbasis pasar.

Dalam debat primer Demokrat, Mamdani secara efektif menyerang konseksi "uang besar" lawannya, mengisinakan data statistik kredibilitas untuk penurunan kekagalan status quo. Ia ditudun "sosialis ekstrem" dan "lunak terhadap kejahatan" oleh lawan-lawannya. Isu identitas juga muncul, Mamdani merangkulnya sebagai kekuatan, lawan-lawan fait-hait agar tidak terlihat Islamofobia atau rasis. Setelah Mamdani memenangkan primer, debat umum melibatkannya dengan kandidat dari partai lain, termasuk saingan memperjatahkan platform progresifnya terhadap kritik, menunjukkan bahwa agendanya pragmatis dan bermanfaat bagi semua warga.

Media massa besar awalnya murtigkin skeptis, namun liputan menjadi lebih seimbang seiring momentum Mamdani yang terus menanjak. Media digital dan sosial menjadi medan pertempuran utama kampanye Mamdani untuk mencapai pemilih muda dan memobilisasi basis akar rumput. Survei pra-pemilihan menunjukkan kandidat moderat unggul di awal primer, namun Mamdani memunjukkan tren peningkatan stabil kenaikan ini didorong oleh partisipasi tinggi dan basis progresif. Kemenangannya di primer tipis namun meyakinkan. Dalam pemilihan umum, Mamdani memiliki keunggulan besar karena dominasi Demokrat di New York, dan ia berhasil mempertahankan basis progresifnya sambil mengarik sebagian pemilih moderat yang lelah dengan inersia politik.

Faktor kunci kemenangan Mamdani melibatkan mobilisasi akar rumput yang sangat efektif, pesan yang resonan tentang keadilan perumahan dan sosial, politik identitas yang memberdayakan, kritik tajam terhadap status quo, gaya komunikasi yang berani, dan kegagalan lawan-lawannya mengatasi kekhawatiran nyata pemilih tentang biaya hidup dan ketidak-setaraan. Kemenangan Mamdani adalah hasil dari dinamika rivalitas, faktor demografi, ekonomi, identitas, dan strategi kampanye yang saling berinteraksi. Pemilih New York memberikan mandat untuk perubahan, memilih seorang pemimpin menjanjikan kota yang lebih adil, inklusif, dan responsif. Kisah pemilihan ini bukan hanya tentang kemenangan politik individu, tetapi juga evolusi politik perkotaan Amerika dan potensi transformatif gerakan akar rumput dalam menantang kekuasaan yang mapan.

Setelah menghaluti seluruh uraian, saya yakin tak perlu membantu menunjukan pesan utama perstiwa ini untuk Indonesia, baik kadar demokrasinya, politiknya, dan apalagi kesenjangan struktural kolonialistiknya.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (nBASIS).

Mamdani, Tonggak Sejarah Muslim AS

Oleh Dr H. Erwan Efendi, S.Sos, MA

Mamdani dikenal sebagai pendukung keras dan setia Palestina bahkan sangat berani mengkritik kebijakan Israel, yang dapat membuat Trump dan pendukungnya merasa tidak nyaman

Fenomena yang terjadi di New York adalah terpilihnya Zohran Mamdani sebagai walikota New York pertama di kota tersebut. Ini merupakan sejarah baru bagi New York, karena Mamdani menjadi pemimpin Muslim pertama dan termuda dengan usia 34 tahun tersebut. Kemenangan ini juga menandai pergeseran politik di kota yang dikenal sebagai pusat keuangan global. Dengan sekaligus menegaskan bahwa dari kota multikultural